



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDY SUPRIYADI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA
3. NHK : 811021

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/185 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 336.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM.SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 203.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.189.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.189.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.